

TESIS

**PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK
DALAM KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK KEPADA
MASYARAKAT**



Diajukan oleh

**EKA RANGGA WARDANI
NIM. 2220215310096**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

**PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM
KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN PENDIDIKAN
POLITIK KEPADA MASYARAKAT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**EKA RANGGA WARDANI
NIM. 2220215310096**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502200112 2 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Judul Tesis : **PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT**

Nama : **EKA RANGGA WARDANI**

NIM : **2220215310096**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502200112 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

WARDANI, EKA RANGGA. 2024. PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 108 halaman.

RINGKASAN

Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan juga kepada seluruh elemen masyarakat, Pelaksanaan pendidikan politik, didalam pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik yang merupakan amanah dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik khususnya Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 serta muatan dalam PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tidak ditemukan aturan terkait, aturan pelaksana, ataupun pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan politik, sehingga timbul permasalahan mengapa pendidikan politik tidak dijalankan sepenuhnya oleh partai politik. Aturan di atas tadi belum mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada masyarakat. Sehingga terdapat beberapa perbedaan terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik. Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara *rigid*.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dapat dilihat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu **Pertama**. Partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. **Kedua**. Belum adanya suatu produk hukum yang mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan oleh partai politik pada saat ini umumnya berkisar di antara yaitu pada saat kampanye, reses, dan ketika bertemu

dengan konstituen. Adapun pedoman pelaksanaannya kembali ke aturan partai masing masing.

WARDANI, EKA RANGGA. 2024. Penguatan Fungsi Partai Politik Dalam Kewajibannya Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Pertanggungjawaban Partai Politik, Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada Masyarakat dan mengkaji serta menganalisis Bagaimanakah sistem Pendidikan politik yang ideal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*).

Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. **Pertama.** Partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai poltik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. **Kedua.** Belum adanya suatu produk hukum yang mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada Masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan oleh partai politik pada saat ini umumnya berkisar di antara yaitu pada saat kampanye, reses, dan ketika bertemu dengan konstituen. Adapun pedoman pelaksanaannya kembali ke aturan partai masing masing.

WARDANI, EKA RANGGA. 2024. *Strengthening the Function of Political Parties in Their Responsibility to Provide Political Education to the Society.* Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., 108 Page.

ABSTRACT

keywords : Political Education, Political Party Responsibility, Society Political Education

The aim of this research is to examine and analyze what forms of accountability and evaluation of political parties are in providing political education to the community and to examine and analyze what an ideal political education system is and is in accordance with common needs and goals, especially to educate the life of the nation. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach.

*From the research results there are conclusions. **First.** Political parties have the function of carrying out political education for the community, so that they can help intelligent people participate in politics. Political education is not only provided to political party cadres themselves but to all elements of society, because in essence political parties receive financial assistance from the APBN/APBD to prioritize implementing political education. Political parties that receive financial assistance sourced from the APBN/APBD which is used as funds to support political education and secretariat operations. Political parties are also required to submit an accountability report for financial assistance to the Government after being examined by the Financial Audit Agency. **Second.** There is no legal product that accommodates how political parties should carry out their obligations in providing political education, especially to the public. The political education presented by political parties currently generally ranges between during campaigns, recesses, and when meeting with constituents. The implementation guidelines return to the respective party rules.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
5. Rekan-rekan satu angkatan 2022 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Eka Ranga Wardani

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul Depan	
Halaman Judul Dalam	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan Tesis	
Ringkasan	
Abstrak	
Daftar Isi	
BAB I	Pendahuluan 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah 7
	C. Keaslian Penelitian 8
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 11
	E. Tinjauan Pustaka 12
	F. Metode Penelitian 34
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 41
BAB II	Bentuk Pertanggungjawaban Serta Evaluasi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat 42
	A. Sistem Politik di Indonesia..... 42
	B. Fungsi Partai Politik Dalam Negara Demokrasi..... 49
	C. Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik 54
	D. Evaluasi Kegiatan Pendidikan Politik 64
BAB III	Sistem Pendidikan Politik Yang Ideal Serta Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tujuan Bersama Terutama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 70
	A. Sejarah dan Politik Hukum Pendidikan Politik di Indonesia..... 70
	B. Pelaksanaan Pendidikan Politik Saat Ini 78
	C. Tantangan Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik 89
	D. Dinamika Rekrutmen Politik Belakangan Ini..... 94
	E. Gagasan Menuju Sistem Pendidikan Politik Yang Lebih Ideal 100
BAB IV	Penutup 107

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup